

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan keuangan Indonesia mengalami perubahan besar pada tahun 2003. Munculnya perubahan tersebut ditandai dengan keluarnya kumpulan Undang-Undang (UU) Keuangan Negara, yang terdiri dari UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Selain itu, Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang menerapkan pendekatan *Cash Towards Accrual* (CTA) menandai perkembangan dalam akuntansi pemerintah Indonesia pada tahun 2005. Ini adalah langkah penting menuju harmonisasi dan peningkatan akuntabilitas sistem keuangan negara.

Pada tahun 2010, Pemerintah Indonesia mengeluarkan PP No. 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintah, yang menggantikan PP No. 24 Tahun 2005 yang sudah tidak berlaku. Berdasarkan peraturan baru ini, sistem pencatatan akuntansi menggunakan basis akrual. Namun PP No. 71 Tahun 2010 juga masih mengatur Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis kas menuju akrual (CTA). Pemerintah pusat dan daerah dapat menerapkan SAP berbasis akrual

secara bertahap, dengan kewajiban penerapan penuh paling lambat pada tahun anggaran 2015.

Berdasarkan UU No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, semua lembaga pemerintah harus menyusun dan menyajikan laporan keuangan mereka sendiri. Salah Satu contoh tanggung jawab pemerintah terhadap pengelolaan anggaran adalah laporan keuangan. Menurut PP No.71 tahun 2010, pemerintah harus membuat tujuh jenis laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK). LRA menyajikan ringkasan sumber daya, alokasi, dan penggunaan sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat dan daerah dan menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya selama periode pelaporan. Sementara itu, LO menyajikan ringkasan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat dan daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Biaya dan beban adalah komponen yang tercakup dalam kedua laporan tersebut.

Menurut PP No. 71 Tahun 2010, pengeluaran yang dilakukan oleh Bendahara Umum selama periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan dibayar kembali oleh pemerintah disebut sebagai belanja. Menurut klasifikasinya, belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja lain-lain. Belanja operasi terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang. Sementara itu, beban merujuk pada kewajiban keuangan yang dikenakan kepada pemerintah yang diakui

sebagai penurunan nilai keseluruhan aset. Menurut klasifikasinya, beban terdiri dari beban operasi dan non-operasi. Beban operasi terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan, beban transfer dan beban lain-lain.

Berdasarkan ringkasan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan tahun 2021 pada Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda), masih ditemukan ketidaksesuaian. Hal ini terlihat dari beberapa K/L dan Pemda yang belum mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Ketidaksesuaian ini disebabkan oleh temuan-temuan terkait ketidakpatuhan terhadap peraturan dan rendahnya kualitas pengungkapan laporan keuangan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Utami & Sulardi (2020), pengungkapan dalam laporan keuangan Pemda di Indonesia masih rendah. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Priharjanto & Wardani (2017) yang menyebutkan bahwa tingkat pengungkapan laporan keuangan berpengaruh positif terhadap opini audit yang diterima.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tangerang Timur merupakan suatu instansi vertikal di bawah Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Sementara itu, KPP Pratama Tangerang Timur juga merupakan suatu entitas akuntansi sehingga wajib untuk menyelenggarakan akuntansi berupa penyusunan laporan keuangan. Selain itu, KPP Pratama Tangerang Timur mempunyai tugas untuk melakukan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan wajib pajak di bidang PPh, PPN, PPnBM dan pajak tidak langsung lainnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Berdasarkan informasi dan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis akan

melakukan penelitian mengenai tinjauan atas penerapan akuntansi beban dan belanja operasional tahun anggaran 2020-2022 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tangerang Timur. Hasil penelitian tersebut akan disusun ke dalam sebuah karya tulis dengan judul “TINJAUAN ATAS PENERAPAN AKUNTANSI BEBAN DAN BELANJA OPERASIONAL PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TANGERANG TIMUR”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme penerapan akuntansi beban dan belanja operasional pada KPP Pratama Tangerang Timur selama dan sesudah masa pandemi Covid-19?
2. Bagaimana klasifikasi beban dan belanja operasional pada KPP Pratama Tangerang Timur?
3. Bagaimana pengakuan dan pengukuran beban dan belanja operasional pada KPP Pratama Tangerang Timur?
4. Bagaimana penyajian dan pengungkapan beban dan belanja operasional pada KPP Pratama Tangerang Timur?
5. Apa permasalahan dan kendala dalam penerapan akuntansi beban dan belanja operasional pada KPP Pratama Tangerang Timur?

1.3 Tujuan Penulisan

1. Mengetahui mekanisme penerapan akuntansi beban dan belanja operasional pada KPP Pratama Tangerang Timur selama dan sesudah masa pandemi Covid-19.
2. Mengetahui bagaimana klasifikasi beban dan belanja operasional pada KPP Pratama Tangerang Timur.
3. Mengetahui bagaimana pengakuan dan pengukuran beban dan belanja operasional pada KPP Pratama Tangerang Timur.
4. Mengetahui bagaimana penyajian dan pengungkapan beban dan belanja operasional pada KPP Pratama Tangerang Timur.
5. Mengidentifikasi permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan akuntansi beban dan belanja operasional pada KPP Pratama Tangerang Timur.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Pembahasan dalam karya tulis ini membahas mengenai penerapan akuntansi beban dan belanja operasional di KPP Pratama Tangerang Timur untuk Tahun Anggaran 2020-2022. Fokus pembahasan ini mencakup definisi dan klasifikasi, pengukuran dan pengakuan, serta penyajian dan pengungkapan beban dan belanja operasional. Batasan ini ditetapkan untuk memastikan pembahasan tetap fokus pada topik yang relevan dan sesuai dengan ketersediaan data serta pemahaman dan kemampuan penulis.

1.5 Manfaat Penulisan

Penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak antara lain:

1. Bagi penulis, penelitian ini dapat memperluas wawasan dan menjadi sarana pembelajaran praktis dalam menerapkan ilmu Akuntansi Pemerintah secara langsung di instansi pemerintah.
2. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dalam pelaksanaan akuntansi beban dan belanja operasional sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan memberikan gambaran tentang penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir. Isi pembahasan meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup, manfaat penulisan, serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini membahas teori yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir yang bersumber dari peraturan, studi literatur, dan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) terkait beban dan belanja operasional.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan menjelaskan metode pengumpulan data, memberikan gambaran umum tentang objek penelitian serta membahas hasil penelitian terkait tinjauan penerapan akuntansi beban dan belanja operasional pada objek penelitian. Selain itu, bab ini juga akan mengulas penerapan akuntansi beban dan belanja operasional di KPP Pratama Tangerang Timur selama tahun anggaran 2020-2022, dengan dukungan data yang diperoleh oleh penulis.

BAB IV SIMPULAN

Bab terakhir ini berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah disajikan pada bab I hingga bab III, serta memberikan saran apabila ditemukan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan akuntansi beban dan belanja operasional di KPP Pratama Tangerang Timur.